

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi deliberasi didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik (musyawarah) oleh warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik. Demokrasi deliberatif berusaha merubah kebijakan pemerintah melalui diskusi yang argumentatif, penilaian bersama di antara warga masyarakat. Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria.

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi deliberatif dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berjalan hal ini dilihat dari beberapa indikator dari demokrasi deliberatif yaitu:

6.1.1 Partisipasi

Dari segi partisipasi masyarakat Desa Nduaria dalam perencanaan pembangunan masih relatif rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perencanaan pembangunan dan sebagian masyarakat yang seharian sibuk bekerja dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak bisa mengikuti pertemuan atau musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat masih jauh dari harapan.

6.1.2 Ruang Publik

Pada musrembang di Desa Nduaria, kondisi ini dianggap belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini terjadi karena pembahasan atau diskusi yang terjadi pada forum musrembang hanya berdasarkan pada usulan, bukan berdasar pada isu permasalahan yang terjadi. Hal ini menyebabkan diskusi yang terjadi hanya sekedar menyetujui apa yang telah diputuskan dalam kegiatan pra- musrembang, ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian deliberasi pada kemungkinan untuk membahas permasalahan dengan pertimbangan berbagai sudut pandang tidak dilakukan.

6.1.3 Kendala atau Halangan

Sebagai bahan refleksi atas proses perencanaan pembangunan yang sudah berjalan, cukup menarik untuk mengkaji kembali beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap diakomodir atau tidaknya aspirasi masyarakat yaitu adanya kepentingan politik di kalangan elit desa, tidak diakomodasikan aspirasi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, serta rendahnya pendidikan masyarakat dan faktor ekonomi yang menjadi kendala atau pengaruh dalam proses perencanaan pembangunan Desa Nduaria.

6.1.4 Efektivitas

Pembangunan yang efektif akan menumbuhkan keterlibatan (partisipasi) dari masyarakat itu sendiri. Sehingga selain demi pembangunan yang efektif akan terwujud juga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Ketika program pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai rencana atau tepat sasaran, dan tepat waktu maka dengan demikian tujuan yang diidamkan akan tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat bahkan pemerintah.

Pembangunan yang dilakukan di Desa Nduaria sudah tepat sasaran dimana hasil wawancara dan pengamatan peneliliti selama melakukan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar merupakan kegiatan yang sangat urgen dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Nduaria, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- Pada akhirnya partisipasi itu akan terwakili oleh beberapa kalangan saja yang terpelajar dan yang berwawasan karena itu demokrasi deliberative harus kuat pada tingkat dusun dimana warga kurang lebih homogen dan lebih kecil jumlahnya dimana orang merasa tidak gerogi dalam mengemukakan pendapat, jadi kalau mau membuat usulan maka penguatan demokrasi delibertif itu harus dimulai pertama pada tingkat dusun baru ke tingkat yang lebih tinggi yaitu musdes karena dusun adalah homogennya masyarakat.
- Keputusan yang diambil harus berdasarkan pada isu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bukan berdasarkan pada usulan, hal ini menyebabkan diskusi yang terjadi hanya sekedar menyetujui apa yang telah diputuskan dalam kegiatan pra- musrembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktis* Jakarta: PT. Bina Karya.

Blacwell, Emzir. 2011. *Analisis Data. Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Giddens, Anthony. 2004, *Konstitusi Masyarakat: Sketsa Teori Strukturasi*, Malang, Pedati,

Habermas, Juergen. 1971. *Toward a Rasioanal Society*, London: Hainemann

Habermas, Juergen. 2007. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Yogyakarta: Kreasi wacana.

Habermas, Juergen. 2007. *Theoris des Komunikativen Handelns (Teori Tindakan Komunikatif): Reason and Rationalisation of Society (Rasio dan Rasionalitas Masyarakat)*, buku satu, yogyakarta: kreasi wacana.

Hadirman, F. Budi, 2003. *Kritik Ideology: Pertautan Penegetahuan Dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius

Hadirman, F. Budi, 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik, Dan Politik Posmodernisme Menurut Juergen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.

Hadirman, F. Budi. 2004. *Demokrasi Deliberatif: Model Untuk Indonesia Pasca-Soeharto*, *Majalah Basis*, No. 11-12, tahun ke-53, November-desember 2004.

Hadirman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Dan Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.

Lincoln, Abraham, 1863. *Lettsbuy Adders 19 November*.

Meyer, T. 2012. *Cara Mudah Memahami Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Moleong, J Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya

Sondang, P. Siagian. 2002. *Kian Meningkatkan Produktifitas Kerja. Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Bumi Aksara*.

Sugiono. 2019. *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.

B. Karya Ilmiah

Ardi, Winata L. Tobing. 2011. dengan judul Demokrasi Deliberatif dalam Ruang Publik *Cyber Space* (Analisis Wacana Demokrasi Deliberatif dalam Ruang Publik pada Komentar Kiriman Bertema UU Pemilukada, UU MD3 dan persetujuan KMP dan KIH di “Diskusi Pluralisme-Lembaga Bhinneka”). Jurnal Ilmu Komunikasi.

Candra, Kusuma. 2012. dengan judul Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah. Depok: Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

Fahrul, Muzaqqi. 2013. dengan judul Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. Universitas Airlangga: Jurnal Politik.

Moh. Yunus 2010 dengan judul Jürgen Habermas dan Demokrasi Deliberatif: Tinjauan Kritis terhadap Praktik Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi 1998. Skripsi Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pedoman Wawancara

A. Indikator Partisipasi Yang Aktif

1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Nduaria?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di Desa Nduaria?

B. Indikator Ruang Publik

1. Apakah semua masyarakat desa dilibatkan dalam proses musyawarah desa?
2. Berapa kali dalam setahun pemerintah desa mengadakan musyawarah dengan masyarakat di Desa Nduaria?

C. Indikator Kendala atau Halangan

1. Apakah ada kendala atau hambatan yang ditemukan dalam proses musyawarah di Desa Nduaria
2. Bagaimana cara untuk mengatasi perbedaan pendapat (perbedaan kepentingan) dalam proses berlangsungnya suatu musyawarah di Desa Nduaria?

D. Indikator epektifitas

1. Apakah kebijakan pembangunan yang dilakukan di desa melalui musyawarah desa sudah tepat sasaran?
2. Apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa?
3. Apakah masyarakat merasa puas dengan pembangunan di Desa Nduaria?

LAMPIRAN

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian



Foto bersama masyarakat Desa Nduaria (2021)



Foto pelaksanaan musyawara Desa Nduaria (2021)



Foto Aktivitas kegiatan pagawai di kantor Desa Nduari



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827
Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com, Website: www.dpmptsp.nttprov.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : DPMPTSP.070/892/PTSP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Elisabeth Indra Wati
NIM : 421 17 047
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Katolik Widya Mandira
Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan di Desa Nduari Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende)
Lokasi Penelitian : Desa Nduari Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende
Waktu Pelaksanaan
a. Mulai : 06 Mei 2021
b. Berakhir : 20 Mei 2021


Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 29 April 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


Drs. MARSIANUS JAWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199503 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kesehatan No. 02 - Telp (0381) 2500205 - email: dpmpstpkabende@gmail.com
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR: DPMPSTP.570 / SKSP.75 / V / 2021

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kanisius Poto, SH, M.AP
NIP : 19661020 198603 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Elisabeth Indra Wati
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 42117047
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Lembaga : Universitas Katolik Widya Mandira
Lokasi Penelitian : Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu
Waktu Penelitian : 6 Mei 2021 s/d 17 Mei 2021
Dasar Surat : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian dari Camat Kelimutu,
Nomor: Kesmas.420/55/V/2021, tanggal 17 Mei 2021
Judul Penelitian : **"Demokrasi Deliberatif Dalam Pembangunan Desa" (Studi
Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan di Desa Nduaria, Kecamatan Kelimutu Kabupaten
Ende)**

Telah selesai melaksanakan penelitian sesuai dengan Surat Keterangan Penelitian yang diberikan.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Ende
Pada Tanggal : 19 Mei 2021

An. Bupati Ende
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ende.


KANISIUS POTO, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661020 198603 1 004

Tembusan: Disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Ende di Ende;
2. Yth. Kepala Kesbangpol Daerah Kab. Ende di Ende;
3. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang;
4. Yth. Kepala Desa Nduaria di tempat.